



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.524, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Dana Percepatan.
Pembangunan Infrastruktur Daerah. Tahun
Anggaran 2011. Pedoman Umum.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 140/PMK.07/2011
TENTANG
ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN
DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I

RUANG LINGKUP

Pasal 1

- (1) Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 yang selanjutnya disebut DPPID adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan merupakan bagian dari Dana Penyesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011.
- (2) DPPID dialokasikan kepada daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan prasarana daerah, yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
- (3) DPPID dialokasikan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota yang digunakan untuk mendanai kegiatan infrastruktur bidang pendidikan, infrastruktur bidang transmigrasi, dan infrastruktur bidang lainnya.

BAB II ALOKASI

Pasal 2

- (1) Alokasi DPPID ditetapkan sebesar Rp6.313.000.000.000,00 (enam triliun tiga ratus tiga belas miliar rupiah).
- (2) Alokasi DPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. Infrastruktur bidang pendidikan untuk kabupaten/kota sebesar Rp613.000.000.000,00 (enam ratus tiga belas miliar rupiah);
 - b. Infrastruktur bidang transmigrasi untuk kabupaten/kota sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
 - c. Infrastruktur bidang lainnya untuk provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp5.200.000.000.000,00 (lima triliun dua ratus miliar rupiah).

BAB III PENETAPAN ALOKASI

Pasal 3

- (1) Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menerima DPPID dan besaran alokasinya ditetapkan dalam rapat kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Rincian daerah penerima dan besaran alokasi DPPID adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Alokasi DPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah pengeluaran paling tinggi yang diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan.

Pasal 4

- (1) Daerah penerima DPPID wajib menggunakan DPPID sesuai dengan bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Daerah penerima DPPID tidak diperbolehkan melakukan pergeseran antar bidang.

BAB IV ARAH KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Infrastruktur bidang pendidikan ditujukan untuk Sekolah

Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka, serta digunakan untuk:

- a. Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas baru, beserta meubeulairnya;
- b. Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan, beserta meubeulairnya; dan
- c. Pembangunan/rehabilitasi ruang belajar lainnya termasuk laboratorium sekolah, beserta meubeulairnya.

(2) Infrastruktur bidang transmigrasi digunakan untuk:

- a. Pemenuhan infrastruktur intra dan antar kawasan transmigrasi; dan
- b. Pemenuhan paket fasilitas umum dan fasilitas sosial permukiman transmigrasi.

(3) Infrastruktur bidang lainnya digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang:

- a. Kesehatan;
- b. Jalan/jembatan;
- c. Irigasi;
- d. Air minum;
- e. Sanitasi;
- f. Kelautan dan perikanan;
- g. Pertanian;
- h. Lingkungan hidup;
- i. Sarana perdagangan;
- j. Waduk dan/atau embung; dan
- k. Prasarana Pemerintahan Daerah.

(4) Petunjuk pelaksanaan DPPID untuk Infrastruktur Bidang Transmigrasi ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Menteri Keuangan ini diundangkan.

(5) Kegiatan yang akan didanai perlu memperhatikan keterbatasan waktu dalam Tahun Anggaran 2011.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 6

(1) DPPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 atau APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011 pada kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah.

- (2) Alokasi DPPID digunakan untuk belanja modal dan belanja barang sebagai penunjang pelaksanaan belanja modal yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah penerima DPPID dapat melaksanakan program dan kegiatannya mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagai dasar pelaksanaannya, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD maupun Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau karena tidak melakukan perubahan APBD, maka tetap dapat melaksanakan program/kegiatan dengan melakukan prosedur seperti tersebut di atas dan menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran DPPID dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran DPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari total alokasi DPPID; dan
 - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari total alokasi DPPID.
- (3) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus.
- (4) Penyaluran Tahap I dapat dilaksanakan setelah Kepala Daerah penerima DPPID menyampaikan surat pernyataan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang menyatakan akan mencantumkan penerimaan DPPID dalam APBD Perubahan atau akan menyampaikan dalam LRA dan akan

mengembalikan DPPID yang sudah disalurkan tersebut ke Kas Negara jika tidak melaksanakan kegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011.

- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisah dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (6) Surat pernyataan disampaikan oleh Kepala Daerah penerima DPPID kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 30 September 2011.
- (7) Surat pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Daerah penerima DPPID kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (8) Penyaluran Tahap II dapat dilaksanakan setelah laporan realisasi penyerapan DPPID Tahap I yang dilampiri daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan untuk program/kegiatan yang didanai DPPID disampaikan oleh Kepala Daerah penerima DPPID kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (9) Laporan realisasi penyerapan DPPID Tahap I dan daftar SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

- (1) Laporan realisasi penyerapan DPPID Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) disampaikan setelah penggunaan dana telah mencapai 30% (tiga puluh persen) dari DPPID Tahap I yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Laporan realisasi penyerapan DPPID Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) disampaikan oleh Kepala Daerah penerima DPPID kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Tahun Anggaran 2011 berakhir.

Pasal 10

Dalam hal DPPID yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan kegiatannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011, maka daerah harus mengembalikan DPPID yang sudah disalurkan tersebut ke Rekening Kas Umum Negara.

BAB VII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Daerah penerima DPPID wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan DPPID paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran 2011 berakhir.
- (2) Laporan realisasi penyerapan DPPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DPPID dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
140/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI
DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN
DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2011

**ALOKASI DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
INFRASTRUKTUR BIDANG PENDIDIKAN**

(dalam juta rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI
I	Provinsi Aceh	
1	Kab. Aceh Barat	902.617
2	Kab. Aceh Besar	903.887
3	Kab. Aceh Selatan	843.145
4	Kab. Aceh Singkil	645.461
5	Kab. Aceh Tengah	796.118
6	Kab. Aceh Tenggara	813.704
7	Kab. Aceh Timur	1,085.375
8	Kab. Aceh Utara	1,515.435
9	Kab. Bireuen	1,034.036
10	Kab. Pidie	894.457
11	Kab. Simeulue	628.040
12	Kota Banda Aceh	1,007.744
13	Kota Sabang	726.810
14	Kota Langsa	686.551
15	Kota Lhokseumawe	698.758
16	Kab. Nagan Raya	753.650
17	Kab. Aceh Jaya	1,242.077
18	Kab. Aceh Barat Daya	983.988
19	Kab. Gayo Lues	761.710
20	Kab. Aceh Tamiang	840.343
21	Kab. Bener Meriah	733.798
22	Kab. Pidie Jaya	1,970.337
23	Kota Subulussalam	1,225.030

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI
II	Provinsi Sumatera Utara	
24	Kab. Asahan	1,513.291
25	Kab. Dairi	1,380.212
26	Kab. Deli Serdang	2,370.431
27	Kab. Karo	1,114.794
28	Kab. Labuhanbatu	1,118.309
29	Kab. Langkat	1,986.002
30	Kab. Mandailing Natal	1,430.669
31	Kab. Nias	1,127.007
32	Kab. Simalungun	1,985.043
33	Kab. Tapanuli Selatan	1,106.034
34	Kab. Tapanuli Tengah	1,142.335
35	Kab. Tapanuli Utara	1,528.080
36	Kab. Toba Samosir	1,111.890
37	Kota Binjai	1,043.534
38	Kota Medan	2,155.440
39	Kota Pematangsiantar	865.068
40	Kota Sibolga	650.554
41	Kota Tanjungbalai	714.623
42	Kota Tebing Tinggi	727.912
43	Kota Padangsidempuan	699.112
44	Kab. Pakpak Bharat	942.891
45	Kab. Nias Selatan	1,636.822
46	Kab. Humbang Hasundutan	1,018.653
47	Kab. Serdang Bedagai	1,878.053
48	Kab. Samosir	964.956
49	Kab. Batubara	1,229.502
50	Kab. Padang Lawas	831.991
51	Kab. Padang Lawas Utara	1,021.145
52	Kab. Labuhanbatu Selatan	795.567
53	Kab. Labuhanbatu Utara	872.875
54	Kab. Nias Barat	954.532
55	Kab. Nias Utara	1,076.059
56	Kota Gunungsitoli	869.778
III	Provinsi Sumatera Barat	
57	Kab. Lima puluh Kota	1,199.235
58	Kab. Agam	1,220.509
59	Kab. Kepulauan Mentawai	635.909

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI
60	Kab. Padang Pariaman	1,311.147
61	Kab. Pasaman	934.444
62	Kab. Pesisir Selatan	1,237.115
63	Kab. Sijunjung	1,133.935
64	Kab. Solok	1,343.301
65	Kab. Tanah Datar	1,309.905
66	Kota Bukittinggi	706.746
67	Kota Padangpanjang	547.292
68	Kota Padang	1,521.793
69	Kota Payakumbuh	668.166
70	Kota Sawahlunto	688.547
71	Kota Solok	864.092
72	Kota Pariaman	655.189
73	Kab. Pasaman Barat	1,337.693
74	Kab. Dharmasraya	815.797
75	Kab. Solok Selatan	775.290
IV	Provinsi Riau	
76	Kab. Bengkalis	913.114
77	Kab. Indragiri Hilir	1,445.632
78	Kab. Indragiri Hulu	1,047.194
79	Kab. Kampar	1,226.392
80	Kab. Kuantan Singingi	1,082.375
81	Kab. Pelalawan	738.891
82	Kab. Rokan Hilir	945.222
83	Kab. Rokan Hulu	1,055.614
84	Kab. Siak	851.524
85	Kota Dumai	685.161
86	Kota Pekanbaru	1,113.971
87	Kab. Kepulauan Meranti	1,050.294
V	Provinsi Kepulauan Riau	
88	Kab. Bintan	647.580
89	Kab. Natuna	645.315
90	Kab. Karimun	671.077
91	Kota Batam	833.672
92	Kota Tanjung Pinang	598.818
93	Kab. Lingga	607.358
94	Kab. Kepulauan Anambas	855.466
VI	Provinsi Jambi	

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI
95	Kab. Batanghari	985.883
96	Kab. Bungo	1,421.464
97	Kab. Kerinci	1,074.684
98	Kab. Merangin	1,106.710
99	Kab. Muaro Jambi	980.259
100	Kab. Sarolangun	1,100.789
101	Kab. Tanjung Jabung Barat	784.234
102	Kab. Tanjung Jabung Timur	997.873
103	Kab. Tebo	896.660
104	Kota Jambi	884.556
105	Kota Sungai Penuh	1,111.631
VII	Provinsi Sumatera Selatan	
106	Kab. Lahat	1,175.830
107	Kab. Musi Banyuasin	1,709.719
108	Kab. Musi Rawas	1,165.103
109	Kab. Muara Enim	1,259.176
110	Kab. Ogan Komering Ilir	1,570.793
111	Kab. Ogan Komering Ulu	1,099.819
112	Kota Palembang	1,664.104
113	Kota Pagar Alam	878.752
114	Kota Lubuklinggau	742.882
115	Kota Prabumulih	737.636
116	Kab. Banyuasin	1,509.143
117	Kab. Ogan Ilir	1,061.127
118	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1,750.729
119	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1,286.342
120	Kab. Empat Lawang	1,583.858
VIII	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
121	Kab. Bangka	717.719
122	Kab. Belitung	692.395
123	Kota Pangkal Pinang	696.779
124	Kab. Bangka Selatan	756.456
125	Kab. Bangka Tengah	701.945
126	Kab. Bangka Barat	770.179
127	Kab. Belitung Timur	820.899
IX	Provinsi Bengkulu	
128	Kab. Bengkulu Selatan	905.035
129	Kab. Bengkulu Utara	1,006.708

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI
130	Kab. Rejang Lebong	1,254.999
131	Kota Bengkulu	830.903
132	Kab. Kaur	876.308
133	Kab. Seluma	1,097.966
134	Kab. Mukomuko	821.106
135	Kab. Lebong	673.107
136	Kab. Kepahiang	843.996
137	Kab. Bengkulu Tengah	1,114.750
X	Provinsi Lampung	
138	Kab. Lampung Barat	1,138.634
139	Kab. Lampung Selatan	1,660.950
140	Kab. Lampung Tengah	2,840.935
141	Kab. Lampung Utara	1,746.717
142	Kab. Lampung Timur	2,255.856
143	Kab. Tanggamus	1,812.788
144	Kab. Tulang Bawang	1,434.791
145	Kab. Way Kanan	1,146.682
146	Kota Bandar Lampung	1,208.266
147	Kota Metro	841.900
148	Kab. Pesawaran	1,780.245
149	Kab. Mesuji	737.587
150	Kab. Pringsewu	1,014.665
151	Kab. Tulang Bawang Barat	2,027.025
XI	Provinsi DKI Jakarta	
152	Kota Administrasi Jakarta Pusat	737.222
153	Kota Administrasi Jakarta Barat	867.334
154	Kota Administrasi Jakarta Selatan	931.711
155	Kota Administrasi Jakarta Timur	1,268.636
156	Kota Administrasi Jakarta Utara	819.214
157	Kab. Administrasi Kepulauan Seribu	520.915
XII	Provinsi Jawa Barat	
158	Kab. Bandung	3,633.765
159	Kab. Bekasi	2,196.677
160	Kab. Bogor	4,526.127
161	Kab. Ciamis	3,172.874
162	Kab. Cianjur	3,235.707
163	Kab. Cirebon	2,698.474
164	Kab. Garut	3,635.866

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI
165	Kab. Indramayu	2,885.472
166	Kab. Karawang	2,545.053
167	Kab. Kuningan	2,113.180
168	Kab. Majalengka	2,560.934
169	Kab. Purwakarta	1,218.529
170	Kab. Subang	1,636.264
171	Kab. Sukabumi	2,955.838
172	Kab. Sumedang	2,004.414
173	Kab. Tasikmalaya	2,264.914
174	Kota Bandung	2,823.738
175	Kota Bekasi	1,274.062
176	Kota Bogor	980.425
177	Kota Cirebon	785.658
178	Kota Depok	2,072.487
179	Kota Sukabumi	839.458
180	Kota Cimahi	782.429
181	Kota Tasikmalaya	973.845
182	Kota Banjar	606.420
183	Kab. Bandung Barat	3,184.960
XIII	Provinsi Banten	
184	Kab. Lebak	1,698.754
185	Kab. Pandeglang	1,996.712
186	Kab. Serang	1,996.739
187	Kab. Tangerang	2,620.850
188	Kota Cilegon	649.501
189	Kota Tangerang	1,077.273
190	Kota Serang	1,394.482
191	Kota Tangerang Selatan	1,179.063
XIV	Provinsi Jawa Tengah	
192	Kab. Banjarnegara	1,950.985
193	Kab. Banyumas	2,503.193
194	Kab. Batang	1,447.095
195	Kab. Blora	2,326.386
196	Kab. Boyolali	2,067.087
197	Kab. Brebes	1,619.695
198	Kab. Cilacap	2,745.092
199	Kab. Demak	1,829.714
200	Kab. Grobogan	2,251.943

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI
201	Kab. Jepara	1,667.456
202	Kab. Karanganyar	1,878.224
203	Kab. Kebumen	1,955.793
204	Kab. Kendal	1,845.083
205	Kab. Klaten	2,201.806
206	Kab. Kudus	1,389.383
207	Kab. Magelang	3,044.438
208	Kab. Pati	1,909.725
209	Kab. Pekalongan	1,909.385
210	Kab. Pemalang	1,967.064
211	Kab. Purbalingga	1,709.739
212	Kab. Purworejo	1,932.469
213	Kab. Rembang	1,518.246
214	Kab. Semarang	1,792.357
215	Kab. Sragen	1,769.925
216	Kab. Sukoharjo	1,606.061
217	Kab. Tegal	2,036.705
218	Kab. Temanggung	1,440.911
219	Kab. Wonogiri	1,911.476
220	Kab. Wonosobo	1,606.628
221	Kota Magelang	675.036
222	Kota Pekalongan	769.696
223	Kota Salatiga	762.505
224	Kota Semarang	1,922.982
225	Kota Surakarta	1,186.918
226	Kota Tegal	1,031.413
XV	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	
227	Kab. Bantul	1,903.123
228	Kab. Gunung Kidul	2,320.919
229	Kab. Kulon Progo	1,485.361
230	Kab. Sleman	2,244.310
231	Kota Yogyakarta	968.657
XVI	Provinsi Jawa Timur	
232	Kab. Bangkalan	2,132.088
233	Kab. Banyuwangi	2,700.727
234	Kab. Blitar	2,314.266
235	Kab. Bojonegoro	2,422.641
236	Kab. Bondowoso	1,765.397

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI
237	Kab. Gresik	1,395.963
238	Kab. Jember	3,016.287
239	Kab. Jombang	1,990.572
240	Kab. Kediri	2,019.811
241	Kab. Lamongan	2,511.803
242	Kab. Lumajang	2,121.274
243	Kab. Madiun	1,434.689
244	Kab. Magetan	1,569.287
245	Kab. Malang	3,493.466
246	Kab. Mojokerto	1,766.250
247	Kab. Nganjuk	1,865.073
248	Kab. Ngawi	2,080.138
249	Kab. Pacitan	1,479.511
250	Kab. Pamekasan	1,753.445
251	Kab. Pasuruan	2,522.694
252	Kab. Ponorogo	2,083.238
253	Kab. Probolinggo	1,700.087
254	Kab. Sampang	1,836.190
255	Kab. Sidoarjo	1,998.274
256	Kab. Situbondo	1,308.856
257	Kab. Sumenep	1,860.500
258	Kab. Trenggalek	1,698.463
259	Kab. Tuban	1,630.354
260	Kab. Tulungagung	1,694.123
261	Kota Blitar	595.294
262	Kota Kediri	605.653
263	Kota Madiun	723.869
264	Kota Malang	1,047.595
265	Kota Mojokerto	649.135
266	Kota Pasuruan	744.030
267	Kota Probolinggo	725.019
268	Kota Surabaya	2,526.938
269	Kota Batu	740.719
XVII	Provinsi Kalimantan Barat	
270	Kab. Bengkayang	1,044.061
271	Kab. Landak	1,249.360
272	Kab. Kapuas Hulu	1,204.788
273	Kab. Ketapang	1,342.725

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI
274	Kab. Pontianak	1,086.740
275	Kab. Sambas	1,327.450
276	Kab. Sanggau	1,517.852
277	Kab. Sintang	1,387.891
278	Kota Pontianak	888.387
279	Kota Singkawang	742.999
280	Kab. Sekadau	894.226
281	Kab. Melawi	938.257
282	Kab. Kayong Utara	1,672.556
283	Kab. Kubu Raya	1,689.136
XVIII	Provinsi Kalimantan Tengah	
284	Kab. Barito Selatan	784.434
285	Kab. Barito Utara	830.106
286	Kab. Kapuas	1,373.756
287	Kab. Kotawaringin Barat	805.959
288	Kab. Kotawaringin Timur	944.559
289	Kota Palangka Raya	863.889
290	Kab. Barito Timur	735.635
291	Kab. Murung Raya	845.872
292	Kab. Pulang Pisau	868.194
293	Kab. Gunung Mas	815.649
294	Kab. Lamandau	650.174
295	Kab. Sukamara	555.586
296	Kab. Katingan	926.137
297	Kab. Seruyan	691.278
XIX	Provinsi Kalimantan Selatan	
298	Kab. Banjar	1,712.322
299	Kab. Barito Kuala	1,178.827
300	Kab. Hulu Sungai Selatan	1,043.818
301	Kab. Hulu Sungai Tengah	983.542
302	Kab. Hulu Sungai Utara	1,019.545
303	Kab. Kotabaru	955.179
304	Kab. Tabalong	889.575
305	Kab. Tanah Laut	1,442.324
306	Kab. Tapin	829.277
307	Kota Banjarbaru	780.942
308	Kota Banjarmasin	993.989
309	Kab. Balangan	976.680

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI
310	Kab. Tanah Bumbu	1,025.832
XX	Provinsi Kalimantan Timur	
311	Kab. Berau	789.446
312	Kab. Bulungan	842.557
313	Kab. Kutai Kartanegara	1,278.800
314	Kab. Kutai Barat	906.470
315	Kab. Kutai Timur	827.510
316	Kab. Malinau	715.128
317	Kab. Nunukan	707.718
318	Kab. Paser	1,012.267
319	Kota Balikpapan	928.398
320	Kota Bontang	652.156
321	Kota Samarinda	1,018.244
322	Kota Tarakan	580.288
323	Kab. Penajam Paser Utara	743.892
324	Kab. Tana Tidung	2,110.220
XXI	Provinsi Sulawesi Utara	
325	Kab. Bolaang Mongondow	1,115.088
326	Kab. Minahasa	1,205.511
327	Kab. Kepulauan Sangihe	1,045.496
328	Kota Bitung	733.735
329	Kota Manado	1,187.776
330	Kab. Kepulauan Talaud	831.638
331	Kab. Minahasa Selatan	1,257.672
332	Kota Tomohon	740.303
333	Kab. Minahasa Utara	1,069.174
334	Kota Kotamobagu	830.208
335	Kab. Bolaang Mongondow Utara	816.591
336	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1,023.455
337	Kab. Minahasa Tenggara	941.669
338	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1,087.392
339	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	981.769
XXII	Provinsi Gorontalo	
340	Kab. Boalemo	958.724
341	Kab. Gorontalo	1,534.992
342	Kota Gorontalo	751.790
343	Kab. Pohuwato	833.294

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI
344	Kab. Bone Bolango	840.164
345	Kab. Gorontalo Utara	1,391.180
XXIII	Provinsi Sulawesi Tengah	
346	Kab. Banggai	1,182.271
347	Kab. Banggai Kepulauan	1,089.370
348	Kab. Buol	794.685
349	Kab. Toli-Toli	842.316
350	Kab. Donggala	1,386.951
351	Kab. Morowali	983.583
352	Kab. Poso	873.898
353	Kota Palu	912.815
354	Kab. Parigi Moutong	1,158.388
355	Kab. Tojo Una-Una	1,119.501
356	Kab. Sigi	1,157.504
XXIV	Provinsi Sulawesi Selatan	
357	Kab. Bantaeng	781.102
358	Kab. Barru	1,038.490
359	Kab. Bone	2,031.776
360	Kab. Bulukumba	1,344.138
361	Kab. Enrekang	1,011.432
362	Kab. Gowa	1,400.018
363	Kab. Jenepono	1,216.140
364	Kab. Luwu	1,227.621
365	Kab. Luwu Utara	1,057.245
366	Kab. Maros	1,086.440
367	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1,085.374
368	Kab. Pinrang	1,163.368
369	Kab. Kepulauan Selayar	830.340
370	Kab. Sidenreng Rappang	1,045.849
371	Kab. Sinjai	1,006.811
372	Kab. Soppeng	1,051.408
373	Kab. Takalar	1,112.346
374	Kab. Tana Toraja	1,193.214
375	Kab. Wajo	1,501.052
376	Kota Parepare	814.446
377	Kota Makassar	1,824.698
378	Kota Palopo	677.915
379	Kab. Luwu Timur	779.529

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI
380	Kab. Toraja Utara	1,327.138
XXV	Provinsi Sulawesi Barat	
381	Kab. Majene	1,055.583
382	Kab. Mamuju	1,311.401
383	Kab. Polewali Mandar	1,250.576
384	Kab. Mamasa	1,564.870
385	Kab. Mamuju Utara	858.390
XXVI	Provinsi Sulawesi Tenggara	
386	Kab. Buton	1,036.661
387	Kab. Konawe	1,568.595
388	Kab. Kolaka	1,348.356
389	Kab. Muna	1,425.861
390	Kota Kendari	970.135
391	Kota Bau-bau	720.635
392	Kab. Konawe Selatan	1,239.911
393	Kab. Bombana	1,017.378
394	Kab. Wakatobi	944.139
395	Kab. Kolaka Utara	967.813
396	Kab. Konawe Utara	1,803.563
397	Kab. Buton Utara	1,579.077
XXVII	Provinsi Bali	
398	Kab. Badung	892.776
399	Kab. Bangli	884.964
400	Kab. Buleleng	1,948.315
401	Kab. Gianyar	1,338.626
402	Kab. Jembrana	1,030.573
403	Kab. Karangasem	1,256.398
404	Kab. Klungkung	933.113
405	Kab. Tabanan	1,264.959
406	Kota Denpasar	970.201
XXVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	
407	Kab. Bima	1,029.040
408	Kab. Dompu	973.013
409	Kab. Lombok Barat	860.509
410	Kab. Lombok Tengah	1,508.029
411	Kab. Lombok Timur	1,192.847
412	Kab. Sumbawa	1,740.904
413	Kota Mataram	798.295

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI
414	Kota Bima	851.705
415	Kab. Sumbawa Barat	1,102.024
416	Kab. Lombok Utara	1,120.259
XXIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur	
417	Kab. Alor	785.148
418	Kab. Belu	1,206.845
419	Kab. Ende	1,383.017
420	Kab. Flores Timur	1,083.942
421	Kab. Kupang	1,189.030
422	Kab. Lembata	781.156
423	Kab. Manggarai	977.970
424	Kab. Ngada	1,035.531
425	Kab. Sikka	1,082.111
426	Kab. Sumba Barat	998.025
427	Kab. Sumba Timur	821.844
428	Kab. Timor Tengah Selatan	1,498.877
429	Kab. Timor Tengah Utara	932.151
430	Kota Kupang	601.371
431	Kab. Rote Ndao	608.798
432	Kab. Manggarai Barat	799.178
433	Kab. Nagekeo	1,470.328
434	Kab. Sumba Barat Daya	1,398.679
435	Kab. Sumba Tengah	853.963
436	Kab. Manggarai Timur	1,645.276
437	Kab. Sabu Raijua	1,089.144
XXX	Provinsi Maluku	
438	Kab. Maluku Tenggara Barat	660.462
439	Kab. Maluku Tengah	1,204.428
440	Kab. Maluku Tenggara	649.521
441	Kab. Buru	1,340.468
442	Kota Ambon	870.501
443	Kab. Seram Bagian Barat	753.479
444	Kab. Seram Bagian Timur	1,281.780
445	Kab. Kepulauan Aru	688.908
446	Kota Tual	1,108.767
447	Kab. Maluku Barat Daya	698.535
448	Kab. Buru Selatan	1,130.301
XXXI	Provinsi Maluku Utara	

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI
449	Kab. Halmahera Tengah	554.307
450	Kab. Halmahera Barat	723.777
451	Kota Ternate	624.154
452	Kab. Halmahera Timur	623.805
453	Kota Tidore Kepulauan	643.874
454	Kab. Kepulauan Sula	704.509
455	Kab. Halmahera Selatan	834.388
456	Kab. Halmahera Utara	773.058
457	Kab. Pulau Morotai	677.438
XXXII	Provinsi Papua	
458	Kab. Biak Numfor	951.598
459	Kab. Jayapura	862.000
460	Kab. Jayawijaya	768.395
461	Kab. Merauke	1,271.274
462	Kab. Mimika	717.984
463	Kab. Nabire	803.688
464	Kab. Paniai	794.085
465	Kab. Puncak Jaya	617.479
466	Kab. Kepulauan Yapen	1,058.260
467	Kota Jayapura	684.814
468	Kab. Sarmi	641.441
469	Kab. Keerom	867.848
470	Kab. Yahukimo	769.102
471	Kab. Pegunungan Bintang	764.930
472	Kab. Tolikara	823.060
473	Kab. Boven Digoel	695.410
474	Kab. Mappi	816.111
475	Kab. Asmat	767.476
476	Kab. Waropen	713.760
477	Kab. Supiori	709.916
478	Kab. Mamberamo Raya	780.641
479	Kab. Mamberamo Tengah	881.066
480	Kab. Yalimo	2,363.533
481	Kab. Lanny Jaya	1,418.511
482	Kab. Nduga	1,750.366
483	Kab. Puncak	1,092.446
484	Kab. Dogiyai	1,138.593
485	Kab. Intan Jaya	1,102.036

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI
486	Kab. Deiyai	1,089.275
XXXIII	Provinsi Papua Barat	
487	Kab. Sorong	1,361.031
488	Kab. Manokwari	749.283
489	Kab. Fakfak	1,063.014
490	Kota Sorong	1,242.889
491	Kab. Sorong Selatan	642.809
492	Kab. Raja Ampat	728.735
493	Kab. Teluk Bintuni	1,142.820
494	Kab. Teluk Wondama	642.226
495	Kab. Kaimana	807.895
496	Kab. Maybrat	1,248.566
497	Kab. Tambrauw	1,358.165

JUMLAH DAERAH	497
JUMLAH TOTAL	613,000.000

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
140/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI
DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN
DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2011

**ALOKASI DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
INFRASTRUKTUR BIDANG TRANSMIGRASI**

(dalam juta rupiah)

NO.	NAMA DAERAH	ALOKASI
1	Kab. Sarolangun	24,685.690
2	Kab. Ogan Ilir	10,000.000
3	Kab. Bengkulu Utara	76,774.708
4	Kab. Mesuji	57,898.545
5	Kab. Kapuas	17,200.000
6	Kab. Pulang Pisau	33,076.950
7	Kab. Paser	30,387.965
8	Kab. Buol	41,680.000
9	Kab. Tojo Una-Una	10,000.000
10	Kab. Pinrang	7,000.000
11	Kab. Takalar	18,041.320
12	Kab. Wajo	30,000.000
13	Kab. Muna	20,000.000
14	Kab. Bima	20,000.000
15	Kab. Maluku Tengah	30,086.666
16	Kab. Mimika	15,000.000
17	Kab. Keerom	20,000.000
18	Kab. Manokwari	22,168.156
19	Kab. Teluk Wondama	16,000.000
JUMLAH DAERAH		19
JUMLAH TOTAL		500,000.000

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

ALOKASI DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
INFRASTRUKTUR BIDANG LAINNYA

NO	NAMA DAERAH	KESEHATAN	JALAN/ JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	SARANA PERDAGANGAN	WADUK DAN /ATAU EMBUNG	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH
I	Provinsi Aceh	-	5,078571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,078571
1	Kab Aceh Barat	-	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
2	Kab Aceh Besar	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
3	Kab Aceh Selatan	-	6,559858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,559858
4	Kab Aceh Singkil	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
5	Kab Aceh Tengah	-	11,700000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,700000
6	Kab Aceh Tenggara	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
7	Kab Aceh Timur	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
8	Kab Aceh Utara	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
9	Kab Bireuen	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
10	Kab Pidie	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
11	Kab Simeulue	-	6,559858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,559858
12	Kota Banda Aceh	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
13	Kota Sabang	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
14	Kota Langsa	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
15	Kota Lhokseumawe	-	4,820409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,820409
16	Kab Nagan Raya	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
17	Kab Aceh Jaya	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
18	Kab Aceh Barat Daya	-	-	-	-	-	-	13,500000	-	-	-	-	13,500000
19	Kab Gayo Lues	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
20	Kab Aceh Tamiang	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
21	Kab Bener Meriah	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000

(dalam juta rupiah)

NO	NAMA DAERAH	KESEHATAN	JALAN/ JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	SARANA PERDAGANGAN	WADUK DAN /ATAU EMBUNG	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH
22	Kab Pidie Jaya	-	8,919000	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	17,919000
23	Kota Subulussalam	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
II	Provinsi Sumatera Utara	-	3,103572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,103572
24	Kab Asahan	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
25	Kab Dairi	-	-	-	4,500000	2,700000	-	-	-	-	-	4,500000	11,700000
26	Kab Deli Serdang	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
27	Kab Karo	-	5,218349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,218349
28	Kab Labuhanbatu	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
29	Kab Langkat	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
30	Kab Mandailing Natal	-	6,559858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,559858
31	Kab Nias	4,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500000
32	Kab Simalungun	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
33	Kab Tapanuli Selatan	-	17,100000	900000	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
34	Kab Tapanuli Tengah	-	8,299282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,299282
35	Kab Tapanuli Utara	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
36	Kab Toba Samosir	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
37	Kota Binjai	-	15,750000	-	1,800000	-	-	-	450000	-	-	-	18,000000
38	Kota Medan	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
39	Kota Pematangsiantar	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
40	Kota Sibolga	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
41	Kota Tanjungbalai	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
42	Kota Tebing Tinggi	-	6,957798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,957798
43	Kota Padangsidempuan	-	6,957798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,957798
44	Kab Pakpak Bharat	-	8,299308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,299308

NO	NAMA DAERAH	KESEHATAN	JALAN/ JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANTIASI	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	SARANA PERDAGANGAN	WADUK DAN /ATAU EMBUNG	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH
45	Kab Nias Selatan	-	4,820409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,820409
46	Kab Humbang Hasundutan	-	5,218349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,218349
47	Kab Serdang Bedagai	-	9,792000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,792000
48	Kab Samosir	-	6,559858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,559858
49	Kab Batubara	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
50	Kab Padang Lawas	-	6,957798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,957798
51	Kab Padang Lawas Utara	-	6,957798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,957798
52	Kab Labuhanbatu Selatan	-	6,957798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,957798
53	Kab Labuhanbatu Utara	4,500000	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,300000
54	Kab Nias Barat	4,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500000
55	Kab Nias Utara	-	8,299308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,299308
56	Kota Gunungsitoli	-	8,299308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,299308
III													
Provinsi Sumatera Barat													
57	Kab Lima puluh Kota	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
58	Kab Agam	-	9,819000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,819000
59	Kab Kepulauan Mentawai	8,919000	8,919000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,838000
60	Kab Padang Pariaman	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
61	Kab Pasaman	-	6,559858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,559858
62	Kab Pesisir Selatan	8,919000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,919000
63	Kab Sijunjung	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
64	Kab Solok	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
65	Kab Tanah Datar	-	6,559858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,559858
		-	6,957798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,957798

NO	NAMA DAERAH	KESEHATAN	JALAN/ JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	SARANA PERDAGANGAN	WADUK DAN /ATAU EMBUNG	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH
66	Kota Bukittinggi	-	5,218349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,218349
67	Kota Padangpanjang	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
68	Kota Padang	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
69	Kota Payakumbuh	-	6,957798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,957798
70	Kota Sawahlunto	-	15,750000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,750000
71	Kota Solok	-	5,218349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,218349
72	Kota Pariaman	-	8,299308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,299308
73	Kab Paseran Barat	-	4,820409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,820409
74	Kab Dharmasraya	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
75	Kab Solok Selatan	-	13,377600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,377600
IV	Provinsi Riau	-	3,103572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,103572
76	Kab Bengkalis	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
77	Kab Indragiri Hilir	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
78	Kab Indragiri Hulu	-	1,739450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,739450
79	Kab Kampar	-	1,739450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,739450
80	Kab Kuantan Singingi	-	1,739450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,739450
81	Kab Pelalawan	8,919000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,919000
82	Kab Rokan Hilir	-	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
83	Kab Rokan Hulu	-	1,739450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,739450
84	Kab Siak	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
85	Kota Dumai	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
86	Kota Pekanbaru	-	1,739450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,739450
87	Kab Kepulauan Meranti	-	4,820409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,820409
V	Provinsi Kepulauan Riau	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
88	Kab Bintan	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959

NO	NAMA DAERAH	KESEHATAN	JALAN/ JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	SARANA PERDAGANGAN	WADUK DAN /ATAU EMBUNG	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH
89	Kab Natuna	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
90	Kab Karimun	-	7,200000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200000
91	Kota Batam	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
92	Kota Tanjung Pinang	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
93	Kab Lingga	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
94	Kab Kepulauan Anambas	4,500000	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
VI	Provinsi Jambi	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
95	Kab Batanghari	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
96	Kab Bungo	-	5,400000	-	5,400000	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
97	Kab Kerinci	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
98	Kab Merangin	10,350000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,350000
99	Kab Muaro Jambi	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
100	Kab Sarolangun	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
101	Kab Tanjung Jabung Barat	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
102	Kab Tanjung Jabung Timur	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
103	Kab Tebo	-	8,865000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,865000
104	Kota Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
105	Kota Sungai Penuh	4,500000	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
VII	Provinsi Sumatera Selatan	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
106	Kab Lahat	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
107	Kab Musi Banyuasin	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
108	Kab Musi Rawas	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
109	Kab Muara Enim	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
110	Kab Ogan Komering	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000

NO	NAMA DAERAH	KESEHATAN	JALAN/ JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANTIASI	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	SARANA PERDAGANGAN	WADUK DAN /ATAU EMBUNG	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH
	Ilir												
111	Kab Ogan Komering Ulu	-	3,478899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,478899
112	Kota Palembang	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
113	Kota Pagar Alam	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
114	Kota Lubuklinggau	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
115	Kota Prabumulih	-	3,478899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,478899
116	Kab Banyuasin	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
117	Kab Ogan Ilir	-	4,820409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,820409
118	Kab Ogan Komering Ulu Timur	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
119	Kab Ogan Komering Ulu Selatan	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
120	Kab Empat Lawang	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
VIII	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	9,028571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,028571
121	Kab Bangka	2,700000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700000
122	Kab Belitung	-	4,820409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,820409
123	Kota Pangkal Pinang	-	6,559858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,559858
124	Kab Bangka Selatan	-	4,820409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,820409
125	Kab Bangka Tengah	-	6,559858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,559858
126	Kab Bangka Barat	-	9,000000	1,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
127	Kab Belitung Timur	-	4,820409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,820409
IX	Provinsi Bengkulu	-	9,028571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,028571
128	Kab Bengkulu Selatan	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
129	Kab Bengkulu Utara	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
130	Kab Rejang Lebong	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
131	Kota Bengkulu	-	17,820000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,820000

NO	NAMA DAERAH	KESEHATAN	JALAN/ JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANTIASI	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	SARANA PERDAGANGAN	WADUK DAN /ATAU EMBUNG	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH
132	Kab Kaur	-	17,820000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,820000
133	Kab Seluma	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
134	Kab Mukomuko	9,000000	4,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
135	Kab Lebong	-	-	-	-	-	-	13,500000	-	-	-	-	13,500000
136	Kab Kepahiang	-	7,200000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200000
137	Kab Bengkulu Tengah	-	8,299308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,299308
X	Provinsi Lampung	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
138	Kab Lampung Barat	-	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
139	Kab Lampung Selatan	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
140	Kab Lampung Tengah	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
141	Kab Lampung Utara	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
142	Kab Lampung Timur	-	4,820409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,820409
143	Kab Tanggamus	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
144	Kab Tulang Bawang	-	8,299308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,299308
145	Kab Way Kanan	9,000000	4,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
146	Kota Bandar Lampung	4,500000	6,300000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
147	Kota Metro	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
148	Kab Pesawaran	-	8,299308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,299308
149	Kab Mesuji	-	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
150	Kab Pringsewu	-	6,957798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,957798
151	Kab Tulang Bawang Barat	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
XI	Provinsi DKI Jakarta	-	3,103572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,103572
152	Kota Administrasi Jakarta Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Kota Administrasi Jakarta Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	NAMA DAERAH	KESEHATAN	JALAN/ JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANTIASI	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	SARANA PERDAGANGAN	WADUK DAN /ATAU EMBUNG	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH
154	Kota Administrasi Jakarta Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Kota Administrasi Jakarta Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	Kota Administrasi Jakarta Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	Kab Administrasi Kepulauan Scribu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	Provinsi Jawa Barat	-	3,103572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,103572
158	Kab Bandung	-	7,200000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200000
159	Kab Bekasi	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
160	Kab Bogor	-	1,739450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,739450
161	Kab Ciamis	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
162	Kab Cianjur	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
163	Kab Cirebon	-	7,200000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200000
164	Kab Garut	-	2,700000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700000
165	Kab Indramayu	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
166	Kab Karawang	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
167	Kab Kuningan	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
168	Kab Majalengka	-	3,478899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,478899
169	Kab Purwakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500000	4,500000
170	Kab Subang	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
171	Kab Sukabumi	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
172	Kab Sumedang	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
173	Kab Tasikmalaya	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
174	Kota Bandung	-	1,739450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,739450
175	Kota Bekasi	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
176	Kota Bogor	-	4,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500000

NO	NAMA DAERAH	KESEHATAN	JALAN/ JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANTIASI	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	SARANA PERDAGANGAN	WADUK DAN /ATAU EMBUNG	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH
177	Kota Cirebon	4,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500000
178	Kota Depok	-	1,739450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,739450
179	Kota Sukabumi	-	3,478899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,478899
180	Kota Cimahi	-	3,478899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,478899
181	Kota Tasikmalaya	-	3,478899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,478899
182	Kota Banjar	-	5,218349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,218349
183	Kab Bandung Barat	-	-	-	-	-	-	9,000000	-	-	-	-	9,000000
XIII	Provinsi Banten	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
184	Kab Lebak	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
185	Kab Pandeglang	-	4,820409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,820409
186	Kab Serang	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
187	Kab Tangerang	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
188	Kota Cilegon	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
189	Kota Tangerang	-	1,739450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,739450
190	Kota Serang	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
191	Kota Tangerang Selatan	9,000000	-	-	-	1,800000	-	-	-	-	-	-	10,800000
XIV	Provinsi Jawa Tengah	-	3,103572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,103572
192	Kab Banjarnegara	-	3,478899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,478899
193	Kab Banyumas	-	1,739450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,739450
194	Kab Batang	-	4,820409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,820409
195	Kab Blora	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
196	Kab Boyolali	-	3,478899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,478899
197	Kab Brebes	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
198	Kab Cilacap	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
199	Kab Demak	-	-	-	-	-	10,800000	-	-	-	-	-	10,800000

NO	NAMA DAERAH	KESEHATAN	JALAN/ JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	SARANA PERDAGANGAN	WADUK DAN /ATAU EMBUNG	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH
200	Kab Grobogan	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
201	Kab Jepara	-	4,820409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,820409
202	Kab Karanganyar	-	5,218349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,218349
203	Kab Kebumen	-	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
204	Kab Kendal	-	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
205	Kab Klaten	-	5,218349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,218349
206	Kab Kudus	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
207	Kab Magelang	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
208	Kab Pati	-	4,820409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,820409
209	Kab Pekalongan	-	6,559858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,559858
210	Kab Pemalang	-	-	-	-	-	9,000000	-	-	-	-	-	9,000000
211	Kab Purbalingga	-	3,478899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,478899
212	Kab Purworejo	-	13,376700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,376700
213	Kab Rembang	-	6,559858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,559858
214	Kab Semarang	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
215	Kab Sragen	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
216	Kab Sukoharjo	-	3,478899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,478899
217	Kab Tegal	-	4,820409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,820409
218	Kab Temanggung	-	6,750000	6,750000	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
219	Kab Wonogiri	-	4,820409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,820409
220	Kab Wonosobo	-	3,478899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,478899
221	Kota Magelang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000	9,000000
222	Kota Pekalongan	-	6,559858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,559858
223	Kota Salatiga	9,000000	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
224	Kota Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000	9,000000
225	Kota Surakarta	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000

NO	NAMA DAERAH	KESEHATAN	JALAN/ JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	SARANA PERDAGANGAN	WADUK DAN /ATAU EMBUNG	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH
226	Kota Tegal	-	6,559858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,559858
XV	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	-	7,053571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,053571
227	Kab Bantul	-	7,200000	3,600000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
228	Kab Gunung Kidul	-	6,559858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,559858
229	Kab Kulon Progo	-	9,900000	4,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400000
230	Kab Sleman	-	1,739450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,739450
231	Kota Yogyakarta	-	1,739450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,739450
XVI	Provinsi Jawa Timur	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
232	Kab Bangkalan	-	1,800000	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
233	Kab Banyuwangi	-	-	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
234	Kab Blitar	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
235	Kab Bojonegoro	-	1,739450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,739450
236	Kab Bondowoso	-	9,000000	4,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
237	Kab Gresik	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
238	Kab Jember	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
239	Kab Jombang	-	1,739450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,739450
240	Kab Kediri	-	1,739450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,739450
241	Kab Lamongan	10,350000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,350000
242	Kab Lumajang	4,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500000
243	Kab Madiun	4,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500000
244	Kab Magetan	4,500000	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
245	Kab Malang	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
246	Kab Mojokerto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000	-	10,800000
247	Kab Nganjuk	-	7,200000	1,800000	1,800000	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
248	Kab Ngawi	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000

NO	NAMA DAERAH	KESEHATAN	JALAN/ JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANTIASI	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	SARANA PERDAGANGAN	WADUK DAN /ATAU EMBUNG	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH
249	Kab Pacitan	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
250	Kab Panekasan	-	6,300000	4,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
251	Kab Pasuruan	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
252	Kab Ponorogo	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
253	Kab Probolinggo	-	6,300000	2,700000	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
254	Kab Sampang	4,500000	6,300000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
255	Kab Sidoarjo	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
256	Kab Situbondo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,919000	8,919000
257	Kab Sumenep	-	2,700000	2,700000	1,800000	900000	-	900000	-	-	-	-	9,000000
258	Kab Trenggalek	-	6,559858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,559858
259	Kab Tuban	-	6,750000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,750000
260	Kab Tulungagung	4,500000	6,300000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
261	Kota Blitar	-	9,000000	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
262	Kota Kediri	-	1,739450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,739450
263	Kota Madiun	11,250000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,250000
264	Kota Malang	-	4,500000	-	1,800000	-	-	-	-	-	-	-	6,300000
265	Kota Mojokerto	-	5,218349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,218349
266	Kota Pasuruan	-	6,559858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,559858
267	Kota Probolinggo	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
268	Kota Surabaya	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
269	Kota Batu	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
XVII	Provinsi Kalimantan Barat	-	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
270	Kab Bengkayang	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
271	Kab Landak	-	4,820409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,820409
272	Kab Kapuas Hulu	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959

NO	NAMA DAERAH	KESEHATAN	JALAN/ JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANTIASI	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	SARANA PERDAGANGAN	WADUK DAN /ATAU EMBUNG	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH
273	Kab Kctapang	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
274	Kab Pontianak	15,750000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,750000
275	Kab Sambas	-	-	-	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	10,800000
276	Kab Sanggau	4,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500000
277	Kab Sintang	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
278	Kota Pontianak	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
279	Kota Singkawang	-	6,559858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,559858
280	Kab Sekadau	-	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
281	Kab Melawi	6,300000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,300000
282	Kab Kayong Utara	-	4,455000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,455000
283	Kab Kubu Raya	-	4,820409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,820409
XVIII	Provinsi Kalimantan Tengah	-	7,053571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,053571
284	Kab Barito Selatan	-	3,478899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,478899
285	Kab Barito Utara	-	3,478899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,478899
286	Kab Kapuas	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
287	Kab Kotawaringin Barat	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
288	Kab Kotawaringin Timur	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
289	Kota Palangka Raya	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
290	Kab Barito Timur	-	3,478899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,478899
291	Kab Murung Raya	-	1,739450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,739450
292	Kab Pulang Pisau	-	10,696500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,696500
293	Kab Gunung Mas	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
294	Kab Lamandau	-	3,478899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,478899
295	Kab Sukamara	-	4,820409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,820409

NO	NAMA DAERAH	KESEHATAN	JALAN/ JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANTIASI	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	SARANA PERDAGANGAN	WADUK DAN /ATAU EMBUNG	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH
296	Kab Katingan	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
297	Kab Seruyan	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
XIX	Provinsi Kalimantan Selatan	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
298	Kab Banjar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000	9,000000
299	Kab Barito Kuala	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
300	Kab Hulu Sungai Selatan	-	3,478899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,478899
301	Kab Hulu Sungai Tengah	-	5,218349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,218349
302	Kab Hulu Sungai Utara	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
303	Kab Kotabaru	7,650000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,650000
304	Kab Tabalong	-	8,100000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,100000
305	Kab Tanah Laut	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
306	Kab Tapin	4,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500000
307	Kota Banjarbaru	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
308	Kota Banjarmasin	-	1,739450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,739450
309	Kab Balangan	-	1,739450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,739450
310	Kab Tanah Bumbu	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
XX	Provinsi Kalimantan Timur	-	3,103572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,103572
311	Kab Berau	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
312	Kab Bulungan	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
313	Kab Kutai Kartanegara	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
314	Kab Kutai Barat	-	6,750000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,750000
315	Kab Kutai Timur	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959

NO	NAMA DAERAH	KESEHATAN	JALAN/ JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	SARANA PERDAGANGAN	WADUK DAN /ATAU EMBUNG	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH
316	Kab Malinau	-	4,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500000
317	Kab Nunukan	-	7,200000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200000
318	Kab Paser	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
319	Kota Balikpapan	-	7,200000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200000
320	Kota Bontang	7,200000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200000
321	Kota Samarinda	-	1,739450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,739450
322	Kota Tarakan	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
323	Kab Penajam Paser Utara	-	8,919000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,919000
324	Kab Tana Tidung	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
XXI	Provinsi Sulawesi Utara	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
325	Kab Bolaang Mongondow	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
326	Kab Minahasa	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
327	Kab Kepulauan Sangihe	2,700000	7,200000	3,600000	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
328	Kota Bitung	2,700000	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
329	Kota Manado	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
330	Kab Kepulauan Talaud	-	6,559858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,559858
331	Kab Minahasa Selatan	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200000	18,000000
332	Kota Tomohon	-	6,300000	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400000	11,700000
333	Kab Minahasa Utara	-	17,100000	900000	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
334	Kota Kotamobagu	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
335	Kab Bolaang Mongondow Utara	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000

NO	NAMA DAERAH	KESEHATAN	JALAN/ JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	SARANA PERDAGANGAN	WADUK DAN /ATAU EMBUNG	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH
336	Kab Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	4,500000	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
337	Kab Minahasa Tenggara	-	13,500000	-	4,500000	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
338	Kab Bolaang Mongondow Timur	4,500000	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
339	Kab Bolaang Mongondow Selatan	2,700000	15,300000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
XXII	Provinsi Gorontalo	-	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
340	Kab Boalemo	9,000000	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
341	Kab Gorontalo	-	9,000000	4,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
342	Kota Gorontalo	4,500000	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
343	Kab Pohuwato	-	6,750000	4,500000	2,250000	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
344	Kab Bone Bolango	-	8,299308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,299308
345	Kab Gorontalo Utara	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
XXIII	Provinsi Sulawesi Tengah	22,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,500000
346	Kab Banggai	-	9,000000	-	1,800000	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
347	Kab Banggai Kepulauan	-	4,820409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,820409
348	Kab Buol	-	14,400000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,600000	18,000000
349	Kab Toli-Toli	4,455000	6,705000	2,205000	-	-	-	-	-	-	-	-	13,365000
350	Kab Donggala	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
351	Kab Morowali	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
352	Kab Poso	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
353	Kota Palu	-	8,299308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,299308
354	Kab Parigi Moutong	-	10,755000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,755000
355	Kab Tojo Una-Una	-	13,455000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,455000

NO	NAMA DAERAH	KESEHATAN	JALAN/ JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	SARANA PERDAGANGAN	WADUK DAN /ATAU EMBUNG	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH
356	Kab Sigi	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000	18,000000
XXIV	Provinsi Sulawesi Selatan	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
357	Kab Bantaeng	4,050000	11,250000	-	-	-	-	2,700000	-	-	-	-	18,000000
358	Kab Barru	-	13,500000	-	-	-	4,500000	-	-	-	-	-	18,000000
359	Kab Bone	-	10,696500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,696500
360	Kab Bulukumba	-	15,750000	2,250000	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
361	Kab Enrekang	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	4,500000	-	-	13,500000
362	Kab Gowa	-	13,419000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,419000
363	Kab Jenepono	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
364	Kab Luwu	-	-	-	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	13,500000
365	Kab Luwu Utara	-	-	6,300000	-	-	4,500000	-	-	-	-	-	10,800000
366	Kab Maros	-	17,820000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,820000
367	Kab Pangkajene dan Kepulauan	8,055000	4,500000	-	900000	-	-	-	-	-	-	-	13,455000
368	Kab Pinrang	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
369	Kab Kepulauan Selayar	-	9,000000	4,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
370	Kab Sidenreng Rappang	-	-	7,200000	-	-	-	6,255000	-	-	-	-	13,455000
371	Kab Sinjai	-	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
372	Kab Soppeng	4,500000	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
373	Kab Takalar	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
374	Kab Tana Toraja	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
375	Kab Wajo	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
376	Kota Parepare	5,400000	-	-	-	-	-	-	-	4,050000	-	8,550000	18,000000
377	Kota Makassar	-	6,300000	-	-	-	-	-	2,700000	-	-	-	9,000000
378	Kota Palopo	-	-	-	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	18,000000

NO	NAMA DAERAH	KESEHATAN	JALAN/ JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	SARANA PERDAGANGAN	WADUK DAN /ATAU EMBUNG	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH
379	Kab Luwu Timur	-	-	-	4,500000	-	-	-	-	-	-	-	4,500000
380	Kab Toraja Utara	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
XXV	Provinsi Sulawesi Barat	-	22,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,500000
381	Kab Majene	-	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
382	Kab Mamuju	-	-	-	-	-	-	10,719000	-	-	-	-	10,719000
383	Kab Polewali Mandar	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
384	Kab Mamasa	-	13,500000	4,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
385	Kab Mamuju Utara	-	8,919000	-	-	-	-	4,500000	-	-	-	-	13,419000
XXVI	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	9,028571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,028571
386	Kab Buton	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
387	Kab Konawe	6,750000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,750000
388	Kab Kolaka	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
389	Kab Muna	13,376700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,376700
390	Kota Kendari	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
391	Kota Bau-bau	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
392	Kab Konawe Selatan	6,750000	4,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,250000
393	Kab Bombana	7,200000	6,300000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
394	Kab Wakatobi	-	9,000000	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
395	Kab Kolaka Utara	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
396	Kab Konawe Utara	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
397	Kab Buton Utara	-	-	1,800000	2,700000	-	1,800000	-	-	7,200000	-	-	13,500000
XXVII	Provinsi Bali	-	5,078571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,078571
398	Kab Badung	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
399	Kab Bangli	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000

NO	NAMA DAERAH	KESEHATAN	JALAN/ JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANTIASI	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	SARANA PERDAGANGAN	WADUK DAN /ATAU EMBUNG	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH
400	Kab Buleleng	-	6,559858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,559858
401	Kab Gianyar	-	4,820409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,820409
402	Kab Jembrana	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
403	Kab Karangasem	-	11,700000	1,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
404	Kab Klungkung	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
405	Kab Tabanan	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
406	Kota Denpasar	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
XXVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
407	Kab Bima	4,500000	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
408	Kab Dompu	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
409	Kab Lombok Barat	9,000000	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
410	Kab Lombok Tengah	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
411	Kab Lombok Timur	4,500000	6,300000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
412	Kab Sumbawa	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
413	Kota Mataram	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
414	Kota Bima	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
415	Kab Sumbawa Barat	5,400000	5,355000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,755000
416	Kab Lombok Utara	15,300000	-	2,700000	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
XXIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	4,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000	22,500000
417	Kab Alor	9,000000	4,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
418	Kab Belu	-	6,559858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,559858
419	Kab Ende	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
420	Kab Flores Timur	-	11,700000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,700000
421	Kab Kupang	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
422	Kab Lembata	-	4,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500000

NO	NAMA DAERAH	KESEHATAN	JALAN/ JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	SARANA PERDAGANGAN	WADUK DAN /ATAU EMBUNG	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH
423	Kab Manggarai	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
424	Kab Ngada	-	17,955000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,955000
425	Kab Sikka	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
426	Kab Sumba Barat	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
427	Kab Sumba Timur	-	4,500000	6,300000	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
428	Kab Timor Tengah Selatan	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
429	Kab Timor Tengah Utara	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
430	Kota Kupang	-	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
431	Kab Rote Ndao	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	4,500000	-	13,500000
432	Kab Manggarai Barat	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
433	Kab Nagekeo	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
434	Kab Sumba Barat Daya	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
435	Kab Sumba Tengah	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
436	Kab Manggarai Timur	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
437	Kab Sabu Raijua	6,300000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,300000
XXX	Provinsi Maluku	-	22,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,500000
438	Kab Maluku Tenggara Barat	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
439	Kab Maluku Tengah	5,400000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400000
440	Kab Maluku Tenggara	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
441	Kab Buru	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
442	Kota Ambon	-	9,000000	1,800000	-	-	-	-	-	-	-	7,200000	18,000000
443	Kab Seram Bagian Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000	13,500000
444	Kab Seram Bagian	-	6,300000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500000	10,800000

NO	NAMA DAERAH	KESEHATAN	JALAN/ JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANITASI	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	SARANA PERDAGANGAN	WADUK DAN /ATAU EMBUNG	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH
	Timor												
445	Kab Kepulauan Aru	-	6,300000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500000	10,800000
446	Kota Tual	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
447	Kab Maluku Barat Daya	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
448	Kab Buru Selatan	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
XXXI	Provinsi Maluku Utara	-	9,028571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,028571
449	Kab Halmahera Tengah	-	6,559858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,559858
450	Kab Halmahera Barat	9,000000	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
451	Kota Ternate	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
452	Kab Halmahera Timur	-	8,100000	1,800000	-	-	-	900000	-	-	-	-	10,800000
453	Kota Tidore Kepulauan	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
454	Kab Kepulauan Sula	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
455	Kab Halmahera Selatan	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
456	Kab Halmahera Utara	-	6,559858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,559858
457	Kab Pulau Morotai	-	13,500000	4,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
XXXII	Provinsi Papua	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
458	Kab Biak Numfor	-	-	-	-	-	-	12,600000	-	-	-	-	12,600000
459	Kab Jayapura	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
460	Kab Jayawijaya	-	4,500000	-	-	-	-	-	-	13,500000	-	-	18,000000
461	Kab Merauke	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
462	Kab Mimika	-	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
463	Kab Nabire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000	10,800000
464	Kab Paniai	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000

NO	NAMA DAERAH	KESEHATAN	JALAN/ JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANTIASI	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	SARANA PERDAGANGAN	WADUK DAN /ATAU EMBUNG	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH
465	Kab Puncak Jaya	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
466	Kab Kepulauan Yapen	-	6,559858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,559858
467	Kota Jayapura	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
468	Kab Sarmi	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
469	Kab Keerom	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
470	Kab Yahukimo	-	2,250000	-	-	-	-	-	-	-	-	6,750000	9,000000
471	Kab Pegunungan Bintang	4,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500000
472	Kab Tolikara	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
473	Kab Boven Digoel	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
474	Kab Mappi	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
475	Kab Asmat	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
476	Kab Waropen	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
477	Kab Supiori	-	-	-	-	-	-	4,500000	-	-	-	-	4,500000
478	Kab Mamberamo Raya	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
479	Kab Mamberamo Tengah	-	8,299308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,299308
480	Kab Yalimo	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
481	Kab Lanny Jaya	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
482	Kab Nduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000	10,800000
483	Kab Puncak	-	4,820409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,820409
484	Kab Dogiyai	-	6,750000	-	4,500000	-	-	-	-	-	-	6,750000	18,000000
485	Kab Intan Jaya	-	8,299308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,299308
486	Kab Deyai	-	8,299308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,299308
XXXIII	Provinsi Papua Barat											9,000000	18,000000
487	Kab Sorong	-	10,800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
488	Kab Manokwari	-	-	-	-	-	9,000000	-	-	-	-	-	9,000000

NO	NAMA DAERAH	KESEHATAN	JALAN/ JEMBATAN	IRIGASI	AIR MINUM	SANTIASI	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTANIAN	LINGKUNGAN HIDUP	SARANA PERDAGANGAN	WADUK DAN /ATAU EMBUNG	PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH
489	Kab Fakfak	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
490	Kota Sorong	-	13,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500000
491	Kab Sorong Selatan	-	8,299308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,299308
492	Kab Raja Ampat	-	3,080959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,080959
493	Kab Teluk Bintuni	-	-	-	-	-	-	9,000000	-	-	-	-	9,000000
494	Kab Teluk Wondama	6,300000	4,500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800000
495	Kab Kaimana	-	9,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000000
496	Kab Maybrat	-	8,299308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,299308
497	Kab Tambora	-	18,000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000000
JUMLAH DAERAH		89	424	44	15	6	6	12	2	4	2	21	524
JUMLAH TOTAL		773,543700	3,663,958300	312,705000	56,250000	47,700000	39,600000	88,074000	3,150000	29,250000	15,300000	170,469000	5,200,000000

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 140/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI
 DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN
 DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN
 INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2011

KOP
 KEPALA
 DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota*)
 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*)
 bersedia melaksanakan kegiatan yang didanai dari Dana
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Tahun Anggaran 2011
 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Akan mencantumkan DPPID Tahun Anggaran 2011 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2011 atau menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal dana yang sudah disalurkan tidak dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka kami akan mengembalikan dana yang sudah disalurkan tersebut ke Kas Negara.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Tahap I DPPID Tahun Anggaran 2011.

Tempat, tanggal

Gubernur/Bupati/Walikota*)

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
140/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI
DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN
DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2011

KOP
KEPALA
DAERAH

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN

DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH (DPPID) TAHUN ANGGARAN 2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota*)
menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan
Realisasi Penyerapan DPPID Tahun Anggaran 2011 Tahap I sebagai
berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara:

Tahap I : Rp

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Daerah:

Tahap Ini : Rp

Sisa DPPID di Rekening Kas Umum Daerah : Rp

Persentase Sisa DPPID :%

No.	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)	Sisa Pagu
		Rp	Rp	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)
1.	Infrastruktur Bidang Pendidikan			
2.	Infrastruktur Bidang Transmigrasi			
3.	Infrastruktur Bidang Lainnya			
	a. Kesehatan b. Jalan/Jembatan c. Irigasi d. Air Minum e. Sanitasi			

f. Kelautan dan Perikanan			
g. Pertanian			
h. Lingkungan Hidup			
i. Sarana Perdagangan			
j. Waduk dan/atau Embung			
k. Prasarana Pemerintahan Daerah			
Jumlah			

Tempat, tanggal

Gubernur/Bupati/Walikota*)

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 140/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI
 DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN
 DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN
 INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2011

KOP
 KEPALA
 DAERAH

**DAFTAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
 YANG DITERBITKAN UNTUK PROGRAM/KEGIATAN YANG DIDANAI
 OLEH DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH (DPPID)
 TAHUN ANGGARAN 2011**

No.	SP2D		Nilai (Rp)	Ket.
	Nomor	Tanggal		
1.	Infrastruktur Bidang Pendidikan			
	-			
	-			
	Jumlah			
2.	Infrastruktur Bidang Transmigrasi			
	-			
	-			
	Jumlah			
3.	Infrastruktur Bidang Lainnya			
	a. Kesehatan			
	-			
	-			
	b. Jalan/Jembatan			
	-			
	-			
	c. dan seterusnya.			
	Jumlah			
	TOTAL			

Tempat, tanggal ...

Kepala Biro/Dinas/Bagian¹⁾

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama ...

NIP ...

¹⁾ Diisi sesuai nomenklatur instansi pengelola keuangan

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 140/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI
 DAN PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN
 DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN
 INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2011

KOP
 KEPALA
 DAERAH

LAPORAN PENYERAPAN
DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH (DPPID)
 TAHUN ANGGARAN 2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota*)
 menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan
 Realisasi Penyerapan DPPID Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:

Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara:

Tahap I : Rp
 Tahap II : Rp
 Total : Rp

No.	Bidang	Pagu	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui Surat Perintah Pencairan Dana Daerah)	Sisa DPPID di Kas Umum Daerah	Realisasi Pelaksanaan Fisik Kegiatan s.d. tanggal 31 Desember 2011
		Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Infrastruktur Bidang Pendidikan				
2.	Infrastruktur Bidang Transmigrasi				
3.	Infrastruktur Bidang Lainnya				
	a. Kesehatan b. Jalan/Jembatan c. Irigasi d. Air Minum e. Sanitasi				

f. Kelautan dan Perikanan				
g. Pertanian				
h. Lingkungan Hidup				
i. Sarana Perdagangan				
j. Waduk dan/atau Embung				
k. Prasarana Pemerintahan Daerah				
Jumlah				

Tempat, tanggal

Gubernur/Bupati/Walikota*)

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO